



Foto : Pemintal benang sutra

RINGKASAN EKSEKUTIF

Di sepanjang mata rantai nilai sutra Sulawesi Selatan tampak beberapa isu yang muncul di seluruh sektor: hulu, manufaktur, maupun hilir. Rangkaian isu lintas sektor tersebut ialah:

- ▶ Kesenjangan antara fakta dan tata kelola, Kurangnya data yang valid dan lengkap terkait pelaku dan produksi dalam rantai nilai sutra Sulawesi Selatan ;
- ▶ Fragmentasi kelembagaan pemerintah;
- ▶ Rendahnya peran pengusaha.

Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas staf yang bersentuhan langsung dengan

pelaku-pelaku marginal, termasuk sensitivitas terhadap isu-isu gender dan inklusi sosial; perbaikan metodologis dan manajemen pengelolaan data; sinkronisasi kebijakan/program dan pembuatan peta jalan sutra Sulawesi Selatan, serta pelibatan pelaku yang lebih luas dalam organisasi-organisasi yang bermitra dengan pemerintah; dan terakhir, penciptaan ruang investasi yang sehat, *fair* dan bebas dari beban 'biaya yang tidak perlu', sekaligus memberi mandat bagi pelaku untuk pembinaan petani, pemintal, dan penenun.

RANGKAIAN ISU YANG MUNCUL DI SELURUH MATA RANTAI SUTRA

Policy Brief ini merupakan bagian dari seri *Policy Brief* tentang rantai nilai sutra Sulawesi Selatan dengan judul '**Mengembalikan Kejayaan Sutra Sulawesi Selatan**', terdiri dari empat bagian:

1. Sektor Hulu,
2. Sektor Manufaktur,
3. Sektor Hilir, dan
4. Lintas Sektor.

Seri *Policy Brief* ini dirumuskan berdasarkan Kajian yang berlangsung Agustus 2020-Januari 2021 oleh Tim Pelaksana Kajian, sebagai bagian dari uji coba penyusunan kebijakan berdasarkan kajian atau *Knowledge to Policy* (K2P), kerjasama antara Bappelitbangda

Provinsi Sulawesi Selatan, *Knowledge Sector Initiative* (KSI), Yayasan BaKTI, dan Payo-Payo. Kajian ini menemukan sederet isu serupa yang muncul di sektor hulu, manufaktur, maupun hilir dalam rantai nilai sutra Sulawesi Selatan. Rangkaian isu lintas-sektor tersebut ialah:

- ▶ Kesenjangan antara fakta dan tata kelola,
- ▶ Kurangnya data yang valid dan lengkap terkait pelaku dan produksi dalam rantai nilai sutra Sulawesi Selatan;
- ▶ Fragmentasi kelembagaan pemerintah; dan
- ▶ Rendahnya peran pengusaha.

KESENJANGAN ANTARA FAKTA DAN TATA KELOLA

Kajian kolaborasi di atas menemukan fakta-fakta mencolok antara lain pekerja perempuan yang termarginalisasi, petani yang cenderung berusia tua, hingga upah murah yang tampak kurang menjadi pertimbangan dalam tata kelola sutra Sulawesi Selatan. Mengingat seluruh mata rantai nilai sutra Sulawesi Selatan didominasi oleh perempuan, sulit menghindari kesan akan rendahnya sensitivitas gender dan

inklusi sosial dalam tata kelola komoditas ini, sejak perumusan perencanaan hingga pelaksanaan program/kebijakan. Akibatnya bisa terlihat, misalnya, pada terabaikannya ratusan perempuan penenun, khususnya dari kategori penenun pekerja maupun penenun kontrak, yang hidup dalam kemiskinan karena upah yang sangat rendah (lebih jauh lihat *Policy Brief* Sektor Manufaktur). Sementara program-



program pemerintah lebih banyak berfokus pada perbaikan komoditas (misal pengadaan murbei, pelatihan teknis, bantuan alat tenun canggih dan

semacamnya), para pelaku skala kecil yang bekerja mentransformasi bahan baku menjadi komoditas mengalami proses marginalisasi.

KURANGNYA DATA PELAKU DAN PRODUKSI

Di seluruh sektor (hulu, manufaktur, dan hilir) dalam rantai nilai sutra Sulawesi Selatan, Tim Pelaksana Kajian sulit menemukan data yang valid dan lengkap, baik mengenai petani, pemintal, maupun penenun. Tim Pelaksana Kajian, misalnya, merasa perlu mengidentifikasi setiap pelaku sektor hulu yang masih aktif karena kesulitan menemukan data bermutu yang dibutuhkan dan bisa dijadikan rujukan. Sementara data tentang pemintal dan penenun hanya ada di Kabupaten Wajo, serta kurang bisa mengungkap situasi mereka karena tak disertai disagregasi kategori menurut posisi sosial mereka dalam sektor manufaktur (sebagai penenun pekerja, langganan/kontrak; pengusaha berskala kecil dan besar). Data yang tersedia hanya memilah mereka menurut kategori teknis (jenis alat tenun yang mereka gunakan). Data-data itu pun kurang bisa dianalisis untuk mengungkap keterlibatan mereka dalam program-program yang sudah diselenggarakan pemerintah, berikut *outcome* dan *impact*-nya. Sedangkan data tentang beberapa

kategori pelaku skala kecil lainnya masih belum tersedia sama sekali, antara lain mereka yang terlibat di sepanjang proses penenunan (semisal *pacello* [orang yang mewarnai benang] dan *pagganra* [orang yang menggulung benang ke pasak boom sebelum dipasang ke alat tenun]) dan mereka yang menjalankan pemasaran (semisal *pappalele* [pedagang pengumpul] dan *passompe* [penjual sarung keliling]).

Sementara itu, data tentang produksi sangat sulit digunakan karena di beberapa titik menunjukkan bahwa data itu sulit dipercaya (sebagai contoh, lihat KOTAK 1).

KOTAK 1

Celah Lebar Antara Data dan Kenyataan

Persoalan data dalam rantai nilai sutra bisa berupa ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan. Data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Soppeng (Grafik 1) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produksi benang di Kabupaten Soppeng nyaris dua kali lipat dari tahun 2019 ke tahun 2020, dari kisaran 649 ribu kilogram ke kisaran 1,2 juta kilogram.

Angka ini sulit dipahami mengingat temuan Tim Pelaksana Kajian di lapangan menunjukkan bahwa jumlah petani yang aktif di Kabupaten Soppeng hanya berjumlah 55 orang. Mereka mengakumulasi produksi kokon rata-rata sebanyak 1.470 kg per siklus, dan dalam setahun mereka memproduksi dalam 6 siklus. Artinya, pada tahun 2020 produksi kokon mereka hanya berkisar 8.820 kilogram.

Dengan angka produksi kokon sebesar itu sulit mengharapkan produksi benang sebesar 1,2 juta kilogram pada tahun 2020. Dampaknya, memberikan angka yang mentereng di atas kertas bisa membuat para penentu kebijakan merasa tidak perlu bergerak lebih agresif untuk memperbaiki keadaan.

GRAFIK 1 Perkembangan Produksi Benang Kab. Soppeng
(sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Soppeng)



FRAGMENTASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH

Persoalan fragmentasi tampak di sektor hulu, manufaktur, maupun hilir, namun lebih kelihatan pada bertumpunya komoditas ini pada dinas-dinas kehutanan dan perindustrian, serta lemahnya mitra pemerintah yang tidak cukup memadai mengatasi kompleksitas tata kelola sutra. Hal ini misalnya tampak pada kesulitan memadukan kerja antar dinas di kabupaten Wajo untuk mengatasi persoalan rendahnya produksi dan kualitas kokon dan benang. Isu ini melintasi ranah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Selama masa penelitian Tim Pelaksana Kajian pun belum menemukan satu peta jalan (*road map*) yang secara komprehensif memuat apa yang perlu diselenggarakan dalam kerangka provinsi. Hal ini dapat dipahami mengingat persoalan fragmentasi kelembagaan pemerintah yang disebut di atas, di samping kurangnya data komprehensif yang bisa menjadi acuan merumuskan peta jalan tersebut. Namun kajian yang mendasari seri *Policy Brief* ini merupakan salah satu upaya untuk menghadirkan data yang diharapkan bisa membantu mengatasi persoalan fragmentasi.

RENDAHNYA PERAN PENGUSAHA

Para pengusaha besar, khususnya mereka yang menjalankan usaha yang terkoneksi langsung dengan petani, pemintal, penenun, dan publik konsumen, tampak kurang memperhatikan nasib para pelaku kecil. Fakta bahwa banyak petani meninggalkan rantai komoditas sutra dan sebagian besar penenun hidup dalam kemiskinan, sesuatu yang hanya bisa terbentuk dari sebuah proses panjang, menunjukkan bahwa para pengusaha besar kurang berperan dalam mencegah terben-

tuknya kondisi memprihatinkan tersebut. Mereka memperoleh keuntungan paling besar secara nominal dari sektor ini ketika marginalisasi terus berlangsung pada pelaku kecil yang setiap hari bekerja bersama mereka. Walaupun sudah terbentuk organisasi mitra pemerintah dalam tata kelola komoditas sutra, termasuk kelompok pengusaha sutra (*Silk Solution Centre, SSC*), hasil kajian menunjukkan bahwa kondisi komoditas ini belum kunjung membaik.

REKOMENDASI: MEMADUKAN LANGKAH MENUJU PERBAIKAN LINTAS SEKTOR DALAM RANTAI NILAI SUTRA

1. Pelatihan sensitivitas gender dan inklusi sosial

Untuk mengatasi kesenjangan antara fakta lapangan dan tata kelola sutra, dibutuhkan pelatihan sensitivitas gender dan inklusi sosial (termasuk prinsip *free, prior, informed consent* [FPIC]), yang terinternalisasi dalam mandat institusi para pihak. Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan dinas-dinas yang mengurus pemberdayaan desa dan masyarakat, bisa bekerja sama dengan masyarakat sipil (ornop) yang punya keahlian relevan untuk melaksanakan program-program berikut ini:

- Pelatihan yang sistematis terkait sensitivitas gender dan inklusi sosial, FPIC, dalam tata kelola sutra, semisal pelatihan mengenali bentuk-bentuk diskriminasi berbasis gender, usia, disabilitas, dan posisi sosial.
- Uji coba dan evaluasi dari hasil pelatihan.
- Internalisasi kapasitas sensitivitas gender dan inklusi sosial dalam mandat institusi para pihak.

2. Perbaikan Metodologis dan Manajerial *Data Base*

Untuk mengatasi rendahnya kualitas data sebagai acuan menyusun program, dibutuhkan penyusunan data base petani, penenun, dan pelaku pemasaran yang lebih lengkap, sistematis, terbaharui, serta dapat diakses dan diberi masukan/dikoreksi oleh publik. Bergantung pada data yang hendak dihimpun Gugus Tugas yang akan dibentuk (lihat di bawah), Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan dinas yang mengurus pemberdayaan desa dan masyarakat dapat bekerja sama dengan BPS Sulsel dan masyarakat sipil (Ornop) yang relevan untuk menjalankan program di bawah ini:

- Pengadaan sistem *data base online/digital* yang bersifat *open source*, dianalisis dan dikendalikan oleh institusi yang kuat, dengan *display* analisis data secara berkala ke publik.

- Mendorong agar kegiatan yang dilakukan oleh para pihak mesti memasukkan unsur pembaharuan *data, evaluasi, output, outcome*, dan *impact* yang telah dicapai.

3. Mengatasi Fragmentasi

Fragmentasi dalam tata kelola rantai nilai sutra dapat dihadapi dengan tiga strategi.

- Pembentukan institusi yang memiliki keluwesan bekerja lintas sektor, kekuatan pelibatan mitra, kewenangan koordinasi yang kuat, dan kewenangan eksekusi kebijakan. Upaya ini bisa berupa pembentukan Gugus Tugas yang terkoneksi dengan kebijakan pusat, kuat mengkoordinasi peran yang ada di provinsi dan kabupaten, lentur dalam sinkronisasi perencanaan, pengalokasian sumber daya. Gugus Tugas (dapat diterjemahkan sesuai dengan bentuk dan kewenangan provinsi) berperan mengakselerasi rencana dan implementasi program-program terkait. Tim dapat dipimpin oleh Gubernur, dan tim Gugus Tugas yang dibentuk di kabupaten dapat tergabung dengan unit ini.
- Pengembangan mitra yang kuat di luar sistem birokrasi untuk peng-

awasan dan kontrol (non parlemen), dan perluasan peran pelaku masyarakat sipil yang tidak hanya bertumpu pada SSC di level kabupaten, atau mengembalikan mandat SSC sebagai asosiasi pelaku usaha mitra pemerintah yang bisa menjadi lembaga publik mitra pemerintah. Untuk hal ini, Gugus Tugas yang akan dibentuk, para mitra dan/atau calon mitra Gugus Tugas yang teridentifikasi dapat bekerja sama dalam program pengembangan mitra pemerintah di level provinsi dan kabupaten, dengan penguatan SSC di provinsi dan kabupaten serta membuka peluang bagi masyarakat sipil lainnya.

- Demi mengarahkan upaya-upaya perbaikan menyeluruh rantai nilai sutra dibutuhkan kesamaan persepsi terhadap peta jalan sutra yang disepakati pihak-pihak terkait. Hal ini bisa dilakukan dengan memetakan strategi setiap *stakeholder* pada wilayah kerja masing-masing. Secara spesifik, Gubernur, bekerja sama dengan Gugus Tugas dalam program penyusunan Peta Jalan pembuatan bisnis model sutra yang melibatkan semua *stakeholder*.

4. Investasi yang sehat, *fair*, dan bebas dari beban 'biaya yang tidak perlu'

Untuk mengatasi rendahnya peran pengusaha dibutuhkan penciptaan ruang bagi pelaku usaha untuk menjalankan investasi yang sehat, *fair* dan bebas dari beban 'biaya yang tidak perlu'; sekaligus memberi mandat bagi pelaku untuk pembinaan petani, pemintal, dan penenun. Untuk itu Gugus Tugas yang akan dibentuk, Dinas Perindustrian, Dinas UMKM, dan Dinas Perindustrian dapat bekerja bersama menjalankan program berikut ini:

- Melanjutkan dan menguatkan program penciptaan kewirausahaan baru (seperti target Wajo dalam menciptakan 1000 pengusaha baru di sektor sutra) yang lebih terkoneksi dengan pembinaan pelaku kecil.



Foto : Penenun sutra dengan alat tenunnya

- Penciptaan program-program kewirausahaan baru dan/atau pembinaan wirausaha baru yang terkoneksi dengan pembinaan pelaku kecil.



Scan kode untuk
mengunduh materi ini

Penulis *Policy Brief* : Nurhady Sirimorok

Policy brief dirumuskan dari Laporan Kajian Rantai Nilai Sutra Sulawesi Selatan yang dilaksanakan atas kerja sama Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Knowledge Sector Initiative (KSI), Yayasan BaKTI dan Payo-Payo.

Tim Pelaksana Kajian : Andi Sadapotto, Lusya Palulungan, Mahyuddin Riwu, Muhammad Alif K. Sahide, Nurhady Sirimorok, Syarif M. Parenreng dan Tim Peneliti Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan (Yvonne M. Salindeho, Andi Fitriyani Yahya, Alsry Mulyani, Rosmala Dewi Said, Yuliana Rauf, Yossi F. Pratama).